



LAPORAN

**HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI
MEUREUDU**

**TRIWULAN IV
OKTOBER - DESEMBER 2022**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, telah tersusunnya Laporan Survey Persepsi Korupsi di Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II Triwulan IV tahun 2022 ini.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik yang berorientasi wilayah bebas dari korupsi adalah dengan melakukan survey persepsi korupsi pada pengguna layanan pengadilan. Dalam survey ini data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa melakukan tatap muka. Survei dilakukan kepada para pengguna layanan Pengadilan Negeri Meureudu.

Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja team survey maka disusun laporan ini yang dimaksudkan untuk memberikan informasi bahwa Pengadilan Negeri Meureudu mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil.

Semoga hasil survey ini dapat membantu memberikan masukan yang positif bagi Pengadilan Negeri Meureudu dan sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan Pelayanan bagi pengguna layanan Pengadilan serta sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja organisasi agar dapat terwujudnya wilayah bersih korupsi.

Demikian Laporan Survey Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Meureudu Triwulan IV tahun 2022 ini disusun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Meureudu, 3 Januari 2023

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Meureudu



Dedy, S.H.

Nip. 19731202 200003 1 001

Ketua Tim



Mawardi, S.H.

Nip. 19740110 199303 1 001

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud Dan Tujuan.....	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja.....	2
BAB II	4
METODOLOGI	4
2.1. Metode Penelitian	4
2.2. Populasi Dan Sampel	4
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis.....	4
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control.....	4
2.5. Teknik Analisis Data	5
2.6. Tahapan pelaksanaan	6
BAB III	8
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	8
3.1. Profil responden.....	8
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator	11
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan.....	18
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan	20
BAB IV	21
PENUTUP	21
4.1. Kesimpulan.....	21
4.2. Rekomendasi	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi yang dan kemampuan penambahan biaya

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survey Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survey Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survey dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner online.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survey dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survey

Survey dilaksanakan dalam interval waktu per 3 (tiga) bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survey dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Meureudu.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang sudah dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh Ketua Tim Survei (Panitera Pengadilan Negeri Meureudu). Ketua Tim Survei akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, mengisi kuesioner dan meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks persepsi anti korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survey lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survey IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2

Ruang lingkup survey Indeks Presepsi Anti Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. Profil Responden

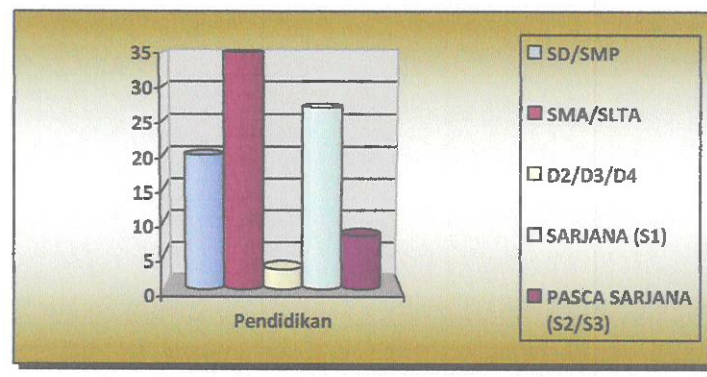
3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survey yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Pengadilan Negeri Meureudu mayoritas berpendidikan terakhir SMA/SLTA sebanyak 35 Orang (37.63 %).

Tabel 4.
Tingkat Pendidikan Responden

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	SD/SMP	20	21.51
2	SMA/SLTA	35	37.63
3	D2/D3/D4	3	3.22
4	SARJANA (S1)	27	29.03
5	PASCA SARJANA (S2/S3)	8	8.61
Jumlah		93	100

Grafik Statistik Pendidikan



3.1.2. Pekerjaan Responden

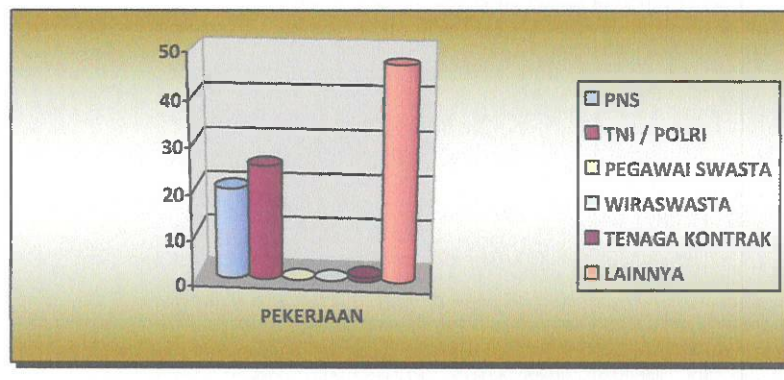
Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebanyak 47 orang (50.54%) responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Meureudu memiliki pekerjaan sebagai lainnya.

Tabel 5.

Jenis pekerjaan responden

No.	Pekerjaan	Frekuensi	%
1.	PNS	20	21.51
2.	TNI/POLRI	25	26.88
3.	SWASTA	0	0
4.	WIRUSAHA	0	0
5.	TENAGA KONTRAK	1	1.07
6.	LAINNYA	47	50.54
Jumlah		93	100

Grafik Statistik Pekerjaan



3.1.3. Kelompok Usia Responden

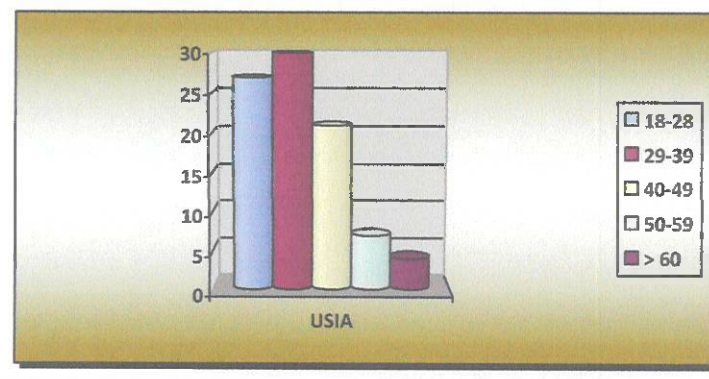
Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Meureudu berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 18 tahun s/d 60 tahun. Bagi kelompok usia di atas 60 tahun, jumlah responden semakin mengecil, demikian

pula kelompok usia di atas 50 tahun. Dan dari hasil survey diperoleh data usia mayoritas 29 s/d 39 sebanyak 46 (51.11%) responden.

Tabel 6.
Usia Responden

No	Umur	Frekuensi	%
1	18-28	27	30.34
2	29-39	30	33.71
3	40-49	21	23.59
4	50-59	7	7.87
5	60>	4	4.49
Jumlah		89	100

Grafik Statistik Usia



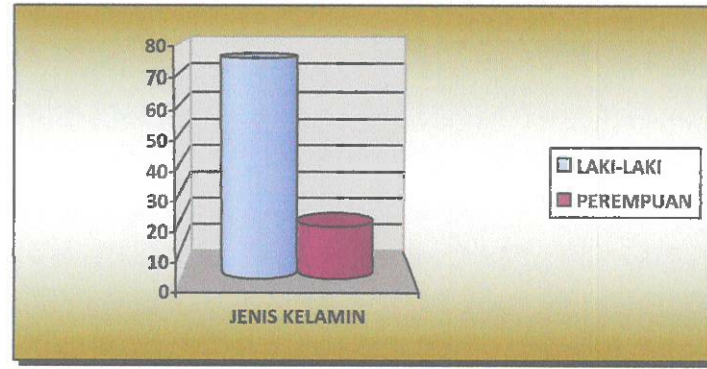
3.1.4. Jenis Kelamin

Menurut hasil survei pada responden yang hadir pada Pengadilan Negeri Meureudu karakteristik responden mayoritas berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 75 (80.65 %) responden.

Tabel 7.
Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1	Laki-laki	75	80.65
2	Perempuan	18	19.35
Jumlah		93	100

Grafik Statistik Jenis Kelamin



3.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index **3.978**.

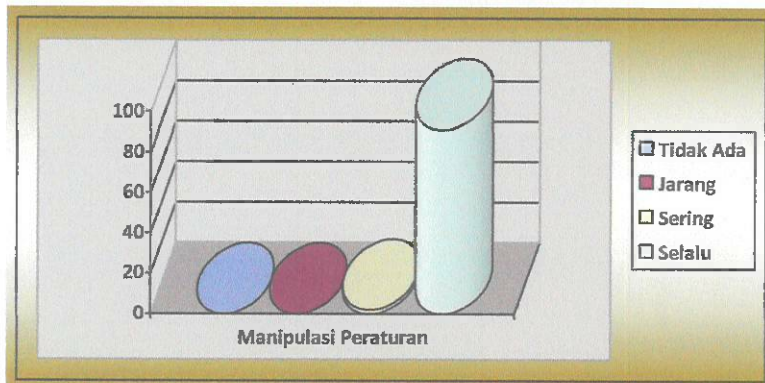
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Meureudu **BERSIH** dari Indikator manipulasi peraturan untuk korupsi.

Tabel 8.

Indeks pada indikator manipulasi peraturan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Ada	1	0	0
2.	Jarang	2	0	0
3.	Sering	3	2	2.15
4.	Selalu	4	91	97.85
Jumlah			93	100

Grafik statistik Manipulasi Peraturan



3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

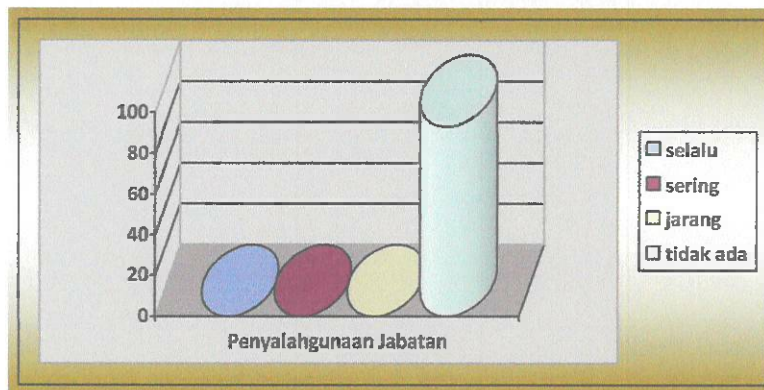
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index **4.000**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pada Pengadilan Negeri Meureudu **BERSIH** dari Penyalahgunaan Jabatan untuk korupsi.

Tabel 9.

Indeks pada penyalahgunaan jabatan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	0	0
4	Tidak Ada	4	93	100
Jumlah			93	100

Grafik statistik Penyalahgunaan Jabatan



3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

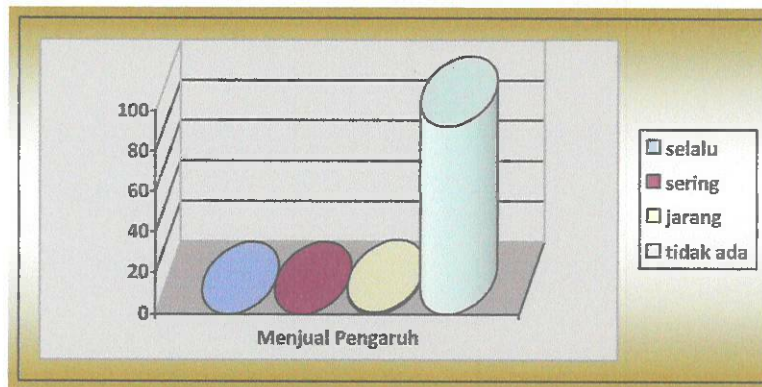
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index **3.989**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pada pengadilan Negeri Meureudu **BERSIH** dari Indikator Menjual Pengaruh untuk korupsi.

Tabel 10.

Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	1	1.07
4.	Tidak Ada	4	92	98.93
Jumlah			93	100

Grafik statistik Menjual Pengaruh



3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index **3.785**.

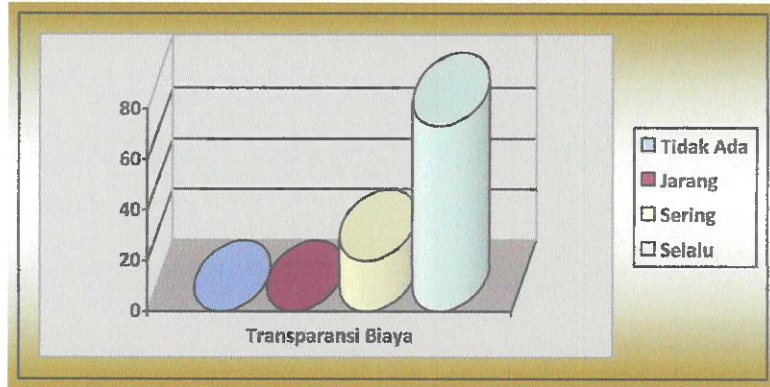
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pada pengadilan Pengadilan Negeri Meureudu **BERSIH** dari indikator transparansi biaya untuk korupsi.

Tabel 11.

Indeks pada indikator transparansi biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Ada	1	0	0
2.	Jarang	2	0	0
3.	Sering	3	20	21.51
4.	Selalu	4	73	78.49
Jumlah			93	100

Grafik statistik Transparansi Biaya



3.2.5. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index **3.968**.

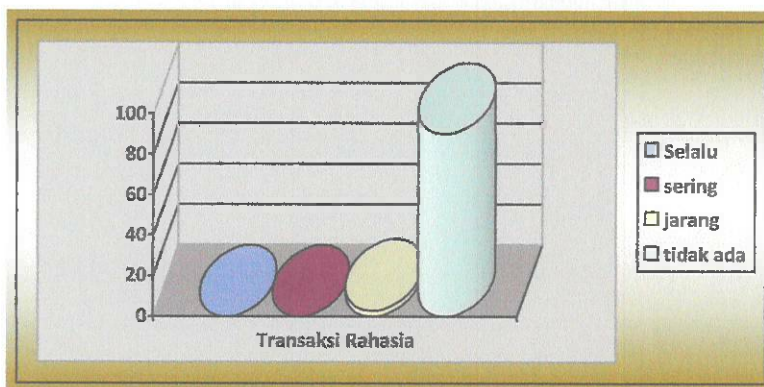
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pada pengadilan Negeri Meureudu **BERSIH** dari indikator transaksi rahasia untuk korupsi.

Tabel 12.

Tabel indeks pada indikator transaksi rahasia

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	3	3.23
4.	Tidak Ada	4	90	96.77
Jumlah			93	100

Grafik statistik Transaksi Rahasia



3.2.6. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index **4.000**

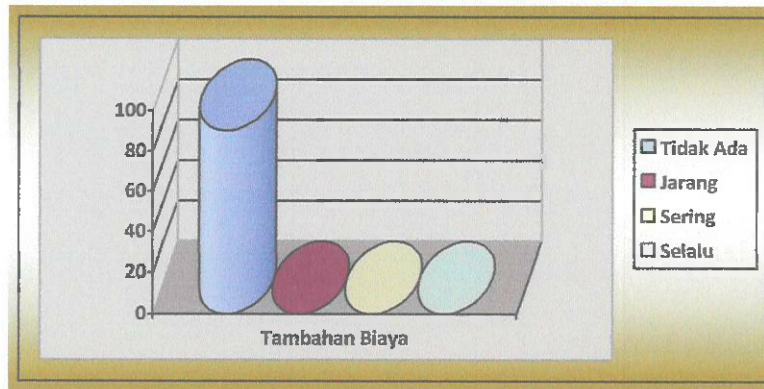
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pada Pengadilan Negeri Meureudu **Bersih** dari indikator tambahan biaya untuk korupsi.

Tabel 13.

Indeks pada indikator tambahan biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Ada	4	93	100
2.	Jarang	3	0	0
3.	Sering	2	0	0
4.	Selalu	1	0	0
Jumlah			93	100

Grafik statistik Tambahan Biaya



3.2.7. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index **4.000**.

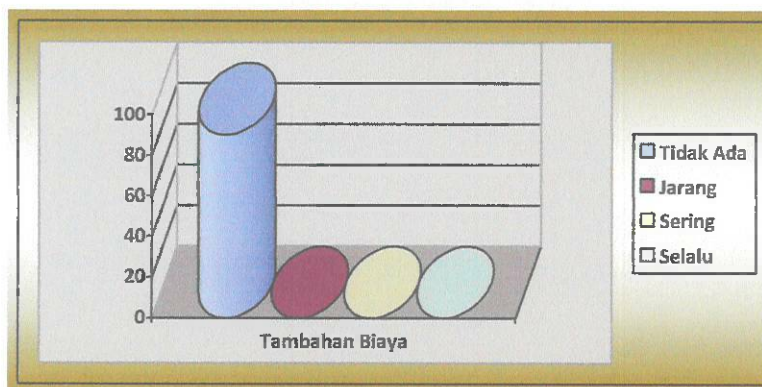
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pada Pengadilan Negeri Meureudu **BERSIH** dari indikator Hadiah untuk korupsi.

Tabel 14.

Indeks pada indikator hadiah

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	0	0
4.	Tidak Ada	4	93	100
Jumlah			93	100

Grafik statistik Hadiah



3.2.8. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada index **3.978**.

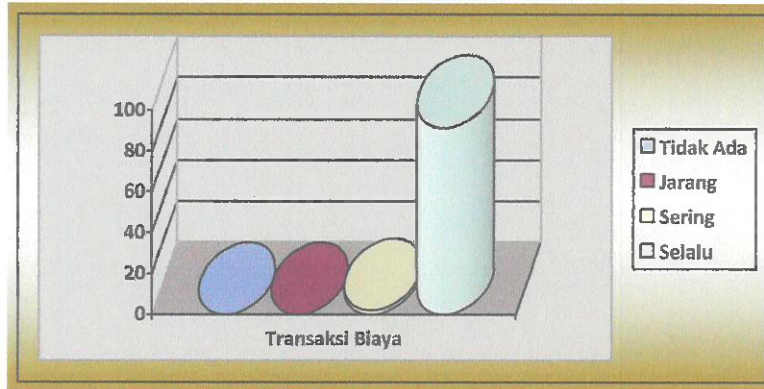
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Meureudu **BERSIH** dari indikator transaksi biaya untuk korupsi.

Tabel 15.

Indeks pada indikator Transaksi Biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Ada	1	0	0
2.	Jarang	2	0	0
3.	Sering	3	2	21.5
4.	Selalu	4	91	97.85
Jumlah			90	100

Grafik statistik Transaksi Biaya



3.2.9. Indikator Percaloan

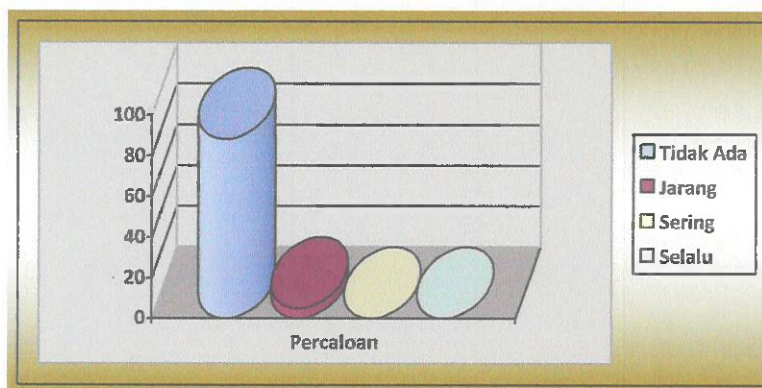
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index **3.946**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan negeri Meureudu BERSIH dari tindakan Percaloan.

Tabel 16.

Indeks pada indikator percaloan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	5	5.38
4.	Tidak Ada	4	88	94.62
Jumlah			93	100

Grafik statistik Percaloan



3.2.10. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index **3.989**

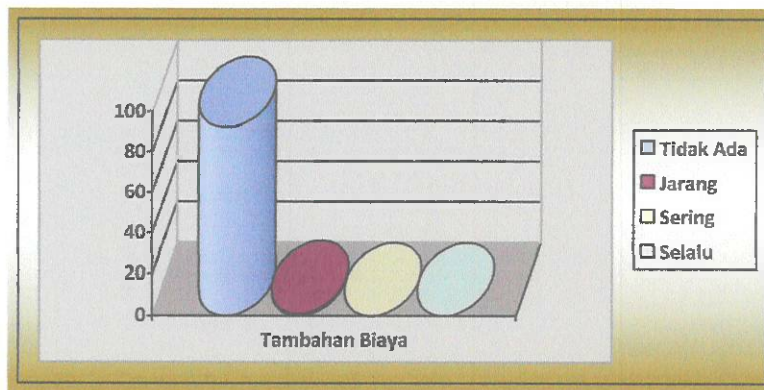
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pada Pengadilan Negeri Meureudu **BERSIH** dari perbuatan curang untuk korupsi.

Tabel 17.

Indeks pada indikator perbuatan curang

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	1	1.07
4.	Tidak Ada	4	92	98.93
Jumlah			93	100

Grafik statistik Perbuatan Curang



3.3. **Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan**

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Pengadilan Negeri Meureudu sebesar **3.96 (99.09%)**

Tabel 18.
Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri Meureudu

No.	Ruang Lingkup	NRR	NRR Tertimbang	%
1.	Manipulasi Peraturan	3.978	0.398	99.450
2.	Penyalahgunaan Jabatan	4.000	0.400	100
3.	Menjual Pengaruh	3.989	0.399	99.725
4.	Transparansi Biaya	3.785	0.378	94.625
5.	Biaya Tambahan	3.968	0.397	99.200
6.	Hadiah	4.000	0.400	100
7.	Transaksi Biaya	4.000	0.400	100
8.	Percaloan	3.978	0.398	99.450
9.	Perbuatan Curang	3.946	0.395	98.650
10.	Transaksi Rahasia	3.989	0,399	99.725
IPK		3.96 (99.09)		

Indeks 3.96 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 4 yaitu 3.26 – 4.00 yang berarti bersih dari korupsi.

Tabel 19.
Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri Meureudu

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang

				bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Meureudu

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Anti Korupsi, survey yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Meureudu

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 20.

Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Meureudu

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Meureudu
1	Pelayanan yang diberikan sudah baik, ramah dan sopan
2	Pelayanan sudah sesuai dengan prosedur
3	Responden menerima bukti pembayaran yang sah

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survey Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Meureudu diperoleh informasi bahwa pada pengadilan Negeri Meureudu memiliki Indeks Persepsi Korupsi **3.96 (99.09%)** atau masuk pada kategori 3.26 – 4.00 yaitu **bersih dari korupsi**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3.978;
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4.000;
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3.989;
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3.785;
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3.968;
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4.000;
7. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 4.000;
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3.978;
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3.946;
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3.989;

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi Korupsi Triwulan IV pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2022 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3.78 atau masuk pada persepsi Bersih dari Korupsi Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa 3 (Tiga) indikator memiliki indeks paling

tinggi yaitu 4.00 namun tetap ada 3 (tiga) yang dipilih sebagai nilai terendah yaitu Transparansi Biaya memiliki indeks 3,785, perbuatan curang memiliki indeks 3,946 dan Biaya tambahan memiliki indeks 3.968. Sehingga perlu diadakan monev terhadap tim survey dan terhadap 3 (tiga) indikator terendah tersebut.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. DATA NILAI INDEKS DAN DETIL RESPONDEN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI PERIODE OKTOBER S/D DESEMBER 2022

The screenshot displays a web interface for the 'Survei Persepsi Anti Korupsi' (Anti-Corruption Perception Survey). The main content area shows a table with 4 rows of data, each representing a different category of perception. The table has columns for 'Kategori', 'Rentan', 'Sangat Baik', and 'Nilai Indeks'. Below the table, there are buttons for 'Periode Triwulan' and 'Tampilkan Data'. The bottom section of the image shows a summary of the survey results, including the total number of respondents (93), the gender distribution (LAKI-LAKI: 75 ORANG, PEREMPUAN: 18 ORANG), and the overall index value (3,96 / 99,09 %).

Kategori	Rentang	Sangat Baik	Nilai Indeks
1	81,20 - 100,00	Sangat Baik	3,25 - 4,00
2	62,51 - 81,25	Baik	2,51 - 3,25
3	43,75 - 62,50	Kurang Baik	1,75 - 2,50
4	25,00 - 43,75	Tidak Baik	1,00 - 1,75

93 RESPONDEN

LAKI-LAKI: 75 ORANG

PEREMPUAN: 18 ORANG

Tidak/Belum Sekolah: 0 ORG

SD: 10 ORG

SMP: 10 ORG

SMTU: 35 ORG

Diploma 1: 0 ORG

PNS: 20 ORG

TRI: 0 ORG

POLRI: 25 ORG

LAINNYA: 47 ORG

Diploma 2: 0 ORG

Diploma 3: 3 ORG

S1: 27 ORG

S2: 8 ORG

S3: 0 ORG

SIWASTA: 0 ORG

WIRAUSSAHA: 0 ORG

TENAGA KONTRAK: 1 ORG

3,96 / 99,09 %

Periode 1 Oktober 2022 sampai 31 Desember 2022

NILAI INDEKS

SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

93 RESPONDEN

LAKI-LAKI: 75 ORANG

PEREMPUAN: 18 ORANG

Tidak/Belum Sekolah: 0 ORG

SD: 10 ORG

SMP: 10 ORG

SMTU: 35 ORG

Diploma 1: 0 ORG

PNS: 20 ORG

TRI: 0 ORG

POLRI: 25 ORG

LAINNYA: 47 ORG

Diploma 2: 0 ORG

Diploma 3: 3 ORG

S1: 27 ORG

S2: 8 ORG

S3: 0 ORG

SIWASTA: 0 ORG

WIRAUSSAHA: 0 ORG

TENAGA KONTRAK: 1 ORG

2. DATA LAYANAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI PERIODE OKTOBER S/D DESEMBER 2022

esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/kontrol_ipak/perhitungan

Register ini berisi perhitungan survey indeks persepsi anti korupsi oleh para pencari keadilan / informasi terhadap beberapa point titik, ukuran integritas pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Bobot IPAK

Keterangan :		
RL	= Ruang Lingkup Pelayanan	1 Sangat Baik 81,26 - 100,00
NRR	= Nilai rata-rata	2 Baik 62,51 - 81,25
IPAK	= Indeks Persepsi Anti Korupsi	3 Kurang Baik 43,76 - 62,50
NRR per RL	= Jml nilai per ruang lingkup / jml kuesioner	4 Tidak Baik 25,00 - 43,75
NRR tertimbang	= NRR per ruang lingkup x (1/10)	

[Pilih Satuan Kerja](#)
[Periode Triwulan *](#)
[Pilih Periode](#)
[2023](#)
[Tampilkan](#)

NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN

[Preview Publikasi](#)

[Indeks Total](#)
[Data Umum Responden](#)
[Data Domisili Responden](#)
[Data Umur Responden](#)
[Data Layanan](#)
[Nilai Per Usur](#)

Layanan	Jumlah (Orang)
1 Layanan Pidana	36
2 Layanan Perdata	20
3 Layanan Hukum / Informasi	20
4 Layanan Administrasi Umum	1
5 Layanan e-Court	16

3. DATA UMUR RESPONDEN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI PERIODE OKTOBER S/D DESEMBER 2022

Register ini berisi perhitungan survey indeks persepsi anti korupsi oleh para pencari keadilan / informasi terhadap beberapa point titik ukur zona integritas pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Bobot IPAK

Keterangan:

- RL = Ruang Lingkup Pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- IPAK = Indeks Persepsi Anti Korupsi
- NRR per RL = Jml nilai per ruang lingkup / jml kuesioner
- NRR tertimbang = NRR per ruang lingkup x (1/10)

Bobot	1	2	3	4
Sangat Baik	81,26 - 100,00			
Baik		62,51 - 81,25		
Kurang Baik			43,76 - 62,50	
Tidak Baik				25,00 - 43,75

[Pilih Substansi Kerja](#)
[Pilih Periode](#)
[2023](#)

NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN

[Preview Publikasi](#)

Indeks Total	Data Umum Responden	Data Domisili Responden	Data Umur Responden	Data Layanan	Nilai Per Unsor
			Jumlah (Orang)		% (Persen)
18 - 28 Th			27		30,34
29 - 39 Th			30		33,71
40 - 49 Th			21		23,60
50 - 59 Th			7		7,87
60 - 69 Th			4		4,49
Total			89		

4. DATA NILAI PERUNSUR SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI PERIODE OKTOBER S/D DESEMBER 2022

Pilih Sajian Kerja

Periode Triwulan *

Publ Periode

2023

Tampilkan Data

NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN

[Preview Publikasi](#)

Indeks Total	Data Unsur Responden										Nilai Per Unsur
	Data Umum Responden	Data Domisili Responden	Data Unsur Responden	Data Layanan							
Deskripsi	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Keterangan
Jumlah	370	372	371	352	369	372	372	370	367	371	
MRR Per RL	3.978	4.000	3.989	3.785	3.968	4.000	4.000	3.978	3.946	3.989	39.634
NRR Terimbang	0.388	0.400	0.395	0.378	0.397	0.400	0.400	0.398	0.395	0.399	3.963
IPAK Unit Pelayanan											
EVALUASI NILAI UNSUR											
3 Unsur Terendah 3 Unsur Tertinggi											
No.	Unsur	Nilai									
1	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?	352									
2	Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?	367									
3	Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?	369									